



TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telepon (0291) 431328 Faks. (0291) 434353

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Peringkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan Program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta yang telah ditetapkan.

Mengetahui :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH,



KUENKO DUMARTONO, SE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681004 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melaksanakan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas kinerja BPPKAD bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan atas target dan realisasi berdasarkan capaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, RKPD Tahun Anggaran 2022 dan DPA BPPKAD Tahun Anggaran 2022. LKjIP juga memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPPKAD.

Dengan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Diketuainya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Diketuainya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai upaya perbalkan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik.

B. Struktur Organisasi

1.1 Tugas dan Fungsi BPPKAD

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada Bab II Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus Bab V (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) Bagian Kesatu (Kedudukan dan Susunan Organisasi) Pasal 68 bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021, bahwa Susunan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Subbid. Perencanaan dan Penetapan;
 2. Sub. Koordinator Pendataan dan Pendaftaran; dan
 3. Subbid. Penagihan dan Keberatan.den
- d. Bidang Anggaran membawahkan :
 1. Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud; dan

2. Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- e. Bidang Perbendaharaan membawahkan :
 1. Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
 2. Subbid. Belanja Langsung.
- f. Bidang Akuntansi membawahkan :
 1. Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud; dan
 2. Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- g. Bidang Pengelolaan Aset daerah
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 2. Subbid. Penatausahaan Aset Daerah; dan
 3. Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- h. Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah
Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pajak daerah

1.2 Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- d. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- e. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi Badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Sekretariat**, merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan Informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan

kepegawalan;

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. **Bidang Pendapatan** merupakan unsur pembantu Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, pendataan, pendaftaran penagihan dan keberatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penagihan dan Keberatan pengelolaan pendapatan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan pajak Daerah, pendataan dan pendaftaran pajak Daerah, penagihan dan pelayanan atas keberatan pengenaan pajak Daerah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan, kebijakan teknis pendataan dan pendaftaran, penetapan, sistem prosedur penagihan dan keberatan pengenaan pajak serta retribusi Daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pendapatan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penetapan

- 2) Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan keberatan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Pendataan dan Pendaftaran.
4. **Bidang Anggaran** mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang anggaran pemerintahan, sosial, budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran pemerintahan, sosial, budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pemerintahan, sosial, budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja;
- d. penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- e. pengoordinasian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan anggaran belanja;
- g. pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan penyusunan anggaran belanja;
- h. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran

belanja;

- i. pembinaan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran belanja;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Anggaran terdiri atas :

- 1) Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran pemerintahan dan sosial budaya;
 - 2) Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang akuntansi Pemerintah Daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. mengoordinasikan fasilitasi penyusunan laporan realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. mengoordinasikan perumusan penyusunan laporan semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. mengoordinasikan perumusan penyusunan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- f. mengoordinasikan perumusan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan Daerah;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan Daerah;
- i. menyelenggarakan rekonsiliasi laporan keuangan Daerah;
- j. melaksanakan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan laporan pertanggungjawaban fungsional;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Akuntansi terdiri atas :

- 1) Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi pemerintahan dan sosial budaya;
 - 2) Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. **Bidang Perbendaharaan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas - penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perbendaharaan pada belanja tidak langsung dan kas Daerah, serta belanja langsung. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan belanja tidak langsung dan kas Daerah, serta belanja langsung;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan keuangan Daerah, kebijakan perbendaharaan, dan pengelolaan utang Daerah;
- e. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian bidang perbendaharaan;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi perbendaharaan pada Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Perbendaharaan terdiri atas :

- 1) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang belanja tidak langsung dan kas Daerah;
 - 2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang belanja langsung; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. **Bidang Pengelolaan Aset Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penatausahaan aset Daerah pemberdayaan dan perubahan status hukum aset Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik Daerah, retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan analisis kebutuhan aset Daerah, penatausahaan aset Daerah, pemberdayaan dan perubahan status hukum aset Daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- d. penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan aset Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Aset terdiri atas :

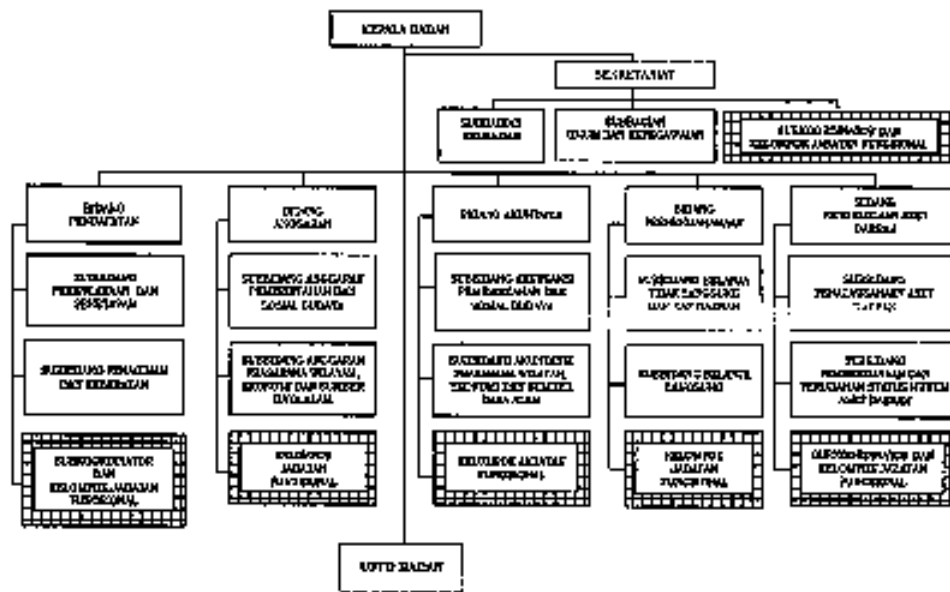
- 1) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan aset Daerah;
 - 2) Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perubahan status hukum aset Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah.
8. **UPTD Pengelola Pajak Daerah** merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pajak daerah. UPTD Pengelola Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Unit yang mempunyai tugas:
- a. Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD;
 - b. Menyiapkan konsep naskah dinas dibidang pengelolaan pajak

- daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
 - d. Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
 - e. Melaksanakan verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - g. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi pengelolaan pajak daerah serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD;
 - j. Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan pajak daerah;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak daerah;
 - n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus



Sumber : Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dimaksudkan agar pelayanan perangkat daerah mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pengguna layanan. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi diperoleh gambaran pelayanan perangkat daerah.

Isu- Isu strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Reformasi Keuangan daerah, mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas, sebagai untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran
2. Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Transparansi informasi dan penggunaan Teknologi Informasi (IT) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah

4. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan aset-aset daerah.

Adapun permasalahan utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Belum optimalnya PAD
2. Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses penganggaran daerah
3. Belum tertibnya pengajuan SPM sesuai ketentuan
4. Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah
5. Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang signifikan disisi pengaturan klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah yang semula terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Beberapa regulasi yang mendasari kinerja BPPKAD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut saat ini masih dalam pembahasan bersama DPRD dalam rapat kerja pansus.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap

tahun anggaran.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah, menyusun anggaran daerah, menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah serta mengelola pendapatan daerah dan keuangan daerah. Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan meliputi Perangkat Daerah, wajib pajak dan wajib retribusi dari kalangan masyarakat serta dunia usaha, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman Standar Pelayanan. Dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), BPPKAD mendasarkan kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Secara garis besar pelayanan BPPKAD antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan guna peningkatan pendapatan daerah.

2. Optimalisasi Pajak-pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pendataan obyek dan subyek pajak/ retribusi yang baru.
4. Pendataan, penllaian dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
5. Pendistribusian SPPT/STTS dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak.
6. Pembinaan kepada wajib pajak yang melanggar Perda bekerjasama dengan Satpol PP.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan daerah.
8. Penyusunan sampai dengan penyelesaian Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
9. Merekap dan fasilitasi usulan program dan kegiatan SKPD berdasarkan KUA PPAS sebagai bahan penyusunan RAPBD maupun Perubahan APBD.
10. Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) APBD maupun Perubahan APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran.
11. Penyusunan bahan-bahan rapat untuk pembahasan penyusunan APBD maupun Perubahan APBD dalam rapat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
12. Penyusunan Rancangan APBD maupun Perubahan APBD hasil pembahasan TAPD untuk dikirim ke DPRD sebagai bahan pembahasan.
13. Penyusunan konsep Nota Keuangan yang disampaikan Bupati di rapat Paripurna DPRD.
14. Penyusunan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD.
15. Melaksanakan urusan di bidang Perbendaharaan dan Otorisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Penyusunan Surat Keputusan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan
17. Melaksanakan Pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) serta mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
18. Membuat register SP2D dan penjagaan reallsasi SP2D.
19. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas, DPA dan DPPA.

20. Menerbitkan SP2D dengan memperhatikan posisi Kas Daerah.
21. Meneliti dan mengolah mutasi perubahan gaji PNS, penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), rapel gaji, gaji terusan dan uang duka/wafat.
22. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaa (JUKLAK) APBD, Penyusunan Anggaran Kas, Belanja Wajib Mengikat.
23. Pembinaan ketatausahaan dalam rangka tertib administrasi kepada SKPD
24. Memfasilitasi dan merealisasikan penerimaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Gubernur
25. Fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
26. Melaksanakan urusan di bidang akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
27. Fasilitasi dan pendampingan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) kepada SKPD
28. Fasilitas membuat jurnal dan membuat saldo awal SKPD
29. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD
30. Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tiap bulan
31. Penyusunan Laporan Triwulanan Realisasi APBD
32. Penyusunan Laporan Semesteran Realisasi APBD
33. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Realisasi APBD.
34. Penyusunan Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
35. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
36. Mengolah data dari Perangkat Daerah guna Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD.

Dalam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah, BPPKAD melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti *SIMDA Keuangan*, *SIMDA Pendapatan*, *SIMDA Aset*, selain itu tuntutan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, BPPKAD melakasankan pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat diantaranya : *Pajak Bumi dan Bangunan (e_PBB)* ada 2 aplikasi yaitu *Sim PBB* dan *Sismiop*, *pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (e_BPHTB)*, *Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e_SPTPD)* *Sistem Informasi Geografis (SIG)* dan *Sistem Aplikasi Tanah (Siaplita)*, *Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)*, *Sim Aset*, *Sim BMD* , *e-Tracking*, *Sim RKBMD* dan *SISWAIPDA (Sistem Informasi Status Wajib Pajak Daerah)*. Semua sistem pelayanan berbasis elektronik diharapkan memudahkan OPD dan masyarakat mengakses dengan cepat dan tepat

D. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
5. Rencana Strategis (Renstra) Nomor 050.1337.2/25.01/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

E. SISTEMATIKA

Penulisan LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Struktur Organisasi
- c. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama
- d. Landasan Hukum
- e. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Rencana Strsategis
- b. Rencana Kinerja
- c. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Analisis Capaian Kinerja
- c. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Releglus, Cerdas dan Sejahtera.

Misi 2, Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

2. Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Releglus, Cerdas dan Sejahtera								
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	18,18%	16,60%	16,70%	16,83%	16,94%	17,04%
		Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	1,91%	4,34%	3,01%	3,25%	3,25%	3,29%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90%	92,30%	93,40%	93,60%	93,70%	94,00%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75	75	80,1	80,2	80,3	80,4

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus

Tahun 2018–2023 yang merupakan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan OPD

Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah - Meningkatnya PAD - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 	<p>Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPKAD yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi guna mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha - Memantapkan dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. - Menyusun kajian potensi secara bertahap atas masing-masing jenis pendapatan - Melakukan pendataan dan penyesuaian nilai obyek pajak berdasarkan kewajaran harga sesuai ketentuan yang berlaku. - Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan - Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan guna optimalisasi pendapatan daerah. 2. Kebijakan Belanja Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat dan prioritas. - Diprioritaskan membiayai program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah dan Indikator Kinerja Pemda dan IKU OPD. - Belanja daerah diarahkan pada upaya pemulihan dampak pasca covid-19 yaitu pemulihan industri, pariwisata dan investasi melalui program peningkatan dan pengembangan perindustrian, pariwisata dan penanaman modal. - Reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. 3. Kebijakan Pembiayaan <p>Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SILPA. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.</p> 4. Kebijakan Umum Akuntansi <ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel - Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan - Mewujudkan keseragaman pengakuan pengukuran maupun pelaporan dari semua transaksi yang terjadi pada entitas pelaporan SKPD/PPKD - Menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten relevan dan andal dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan dengan meminimalkan terjadinya bias terhadap pengungkapan komponen

		laporan keuangan 5. Kebijakan pengelolaan aset daerah <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan - Mendayagunakan aset-aset daerah dan yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ke tiga - Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan
--	--	---

Tabel 2.3 IKU BPPKAD Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
- Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		- Rasio Kemandirian Keuangan daerah	%	16,94%
		- Kualitas LKPD	%	100%
	- Meningkatnya PAD	- Peningkatan PAD per tahun	%	3,25%
	- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%	93,70%
	- Nilai Evaluasi SAKIP	- Nilai Evaluasi SAKIP	Skore	80,3

B. Perjanjian Kinerja

Adalah tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Wujud nyata komitmen;
3. Dasar penilalan, penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; dan
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 telah melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA BPPKAD TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,94%
		Kualitas LKPD	100%
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,70%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,3

No	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah	83,5
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15 Dok
	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	29 Dok
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang
	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	171 Jenis
	Jumlah meubel, perlengkapan dan peralatah gedung kantor	19 Unit
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3 Jenis
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	184 Unit
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target
	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	8 Dok
	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	7 Dok
	Capaian realisasi pembayaran belanja Perangkat Daerah	95%
	Jumlah dokumen SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan daerah	3 Dok
	Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil Kabupaten	1 Tahun
	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	95%
	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Dok

	Persentase realisasi PAD	100%
	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	59 Dok

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	100%	2.287.513.000
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	1.073.173.000
		Capaian realisasi pembayaran belanja Perangkat Daerah	95%	115.900.000
		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	560.427.000
		Belanja Transfer		250.039.918.000
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemda	95%	3.515.055.000
4	Penunjang Urusan Pemda	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja BPPKAD	83,5	20.436.285.000

C. Instrumen Pendukung

Dalam melaksanakan tupoksinya, BPPKAD melaksanakan inovasi-inovasi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain :

1. SISWAIPDA (Sistem Informasi Status Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah)
 - Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang pendapatan mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah.
 - Kondisi saat ini, belum ada integrasi pajak daerah dengan pelayanan perijinan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Koordinasi yang diharapkan dengan terintegrasinya pajak daerah dengan pelayanan perijinan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Tujuan dengan adanya aplikasi SISWAIPDA ada integrasi sistem perijinan dengan data base pajak daerah sehingga dapat mendongkrak PAD.

Manfaat Aplikasi SISWAIPDA antara lain :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi SOP pelayanan pajak daerah.
 - b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelayanan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - c. Memudahkan dan mempercepat proses konfirmasi status wajib pajak daerah bagi masyarakat.
2. **SIM-RKBMD (Sistem Informasi Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aset antara lain adalah menyusun rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD, pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan kebutuhan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati, mengatur pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan kebutuhan BMD.

Kondisi saat ini, penyusunan RKMD belum sesuai dengan rencana kerja dan masih dilaksanakan secara manual. Kondisi yang diinginkan penyusunan RKMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD sesuai dengan rencana kerja dan dilaksanakan dengan sistem aplikasi (SIM-RKBMD).

Tujuan aplikasi SIM-RKBMD adalah SIM-RKBMD dapat diimplementasikan guna meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran daerah.

Manfaat SIM-RKBMD antara lain :

1. Membantu Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
2. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan manajemen aset daerah khususnya dalam penyusunan RKBMD dan pemeliharaan BMD
3. Masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan RKBMD dan pemeliharaan BMD.

Aplikasi SISWAIPDA



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

- Informasi Wajib Pajak
- Informasi objek pajak
- Konfirmasi status pajak kendaraan
- Konfirmasi status pajak listrik
- Konfirmasi status pajak PBB
- Demografi wajib pajak

SISWAIPDA
SISTEM INFORMASI
STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH KABUPATEN KUDUS
<https://siswaipda.kuduskab.go.id/>

**PAJAK LUNAS,
PERIJINAN LANCAR**

Info: siswaipda@pdpt.kuduskab.go.id
#siswaipda #pdpt.kuduskab.go.id
Kuduskab.go.id @pdpt.kuduskab.go.id

Aplikasi SIM-RKBMD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun skala nilai pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Skala pengukuran capaian kinerja	Kategori
1	$\geq 90,1\%$	Sangat tinggi
2	75% - 90%	Tinggi
3	65% - 75%	Sedang
4	50,1% - 65%	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Secara umum Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Keselarasan Renstra BPPKAD dengan RPJMD terkait dengan Misi ke 2 adalah mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik, yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus dapat diukur dengan indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	PAD dibagi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dikali 100%
		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Hasil Reviu Inspektorat
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	PAD Tahun ini dikurangi PAD Tahun lalu dibagi PAD Tahun lalu dikali 100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Jumlah target program dibagi jumlah program dikali 100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil evaluasi dari Inspektorat

1. Perbandingan target dan realisasi pengukuran capaian kinerja tahun ini sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Kategori	Presentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)	Target Nasional (2022)	Capaian s.d.2022 terhadap Target Nasional (%)
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,94%	21,02%	124,08%	Sangat Tinggi	184,43%	121,92%	-	-
2.		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100 memadai	100	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	-	-
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	-17,89%	-21,14%	Sangat Rendah	990,15%	-21,18%	-	-
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,70%	96,52%	103,00%	Sangat Tinggi	102,11%	102,68%	-	-
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,30 nilai	77,89	96,89%	Sangat Tinggi	97,12%	96,89%	-	-

Berdasarkan hasil tabel 3.3 pencapaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2022, disimpulkan bahwa dari 5 indikator kinerja, 4 indikator tercapai, dengan kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator kategori sangat rendah capaiannya dikarenakan pada penetapan target Renstra (2018-2023) BPPKAD menyesuaikan trend realisasi tahun sebelumnya dan post major dampak pandemi covid 19.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 BPPKAD melaksanakan Misi 2 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik dengan menetapkan 5 sasaran strategis yaitu :

a. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,94 %	21,02%	124,08%	184,43%	156,22%
	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100 Memadai	100	100%	100%	100%

➤ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan internal dibandingkan dengan sumber pendanaan eksternal (pendapatan transfer). Hal ini juga menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi total pendapatan daerah mencapai Rp. 1.980.781.072.843,00 atau sebesar 97,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.039.641.707.489,00. Pendapatan tersebut paling besar bersumber dari

Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.562.610.365.077,00 selanjutnya PAD sebesar Rp. 416.454.707.766,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.688.535.585,00 dan terakhir Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.716.000.000,00. Realisasi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus terhadap Pendapatan Transfer dengan proporsi sebesar 78,89%, kontribusi PAD sebesar 21,02% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,09%. Berikut tabel rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 pada lampiran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2022

MOMOR URLIT	URAIAN	Realisasi				r (%)
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
1	2	5	6	6	6	7
1	PENDAPATAN	2.090.430.364.413,00	2.014.962.476.485	2.141.964.999.077	1.980.781.072.843	- 1,61
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	343.824.122.868,00	363.884.186.229	507.428.207.154	416.454.707.766	8,64
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	125.762.587.800,00	126.240.575.956	148.636.766.896	167.300.451.315	10,23
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.058.448.046,00	18.493.582.321	25.754.628.245	24.797.976.244	9,25
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.277.166.654,00	8.704.409.157	8.371.225.490	10.688.535.585	5,89
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	188.725.920.368,00	230.445.618.795	324.665.586.523	213.667.744.622	9,60
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.298.060.004.624,00	1.183.590.147.772	1.583.490.680.923	1.562.610.565.077	7,88
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	209.525.165.300,00	216.676.209.702	1.403.367.377.471	618.681.058.811	165,06
1.2.2	Dana Alokasi Umum	851.036.584.000,00	757.097.370.000	180.123.303.452	741.118.818.488	74,73
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	237.498.255.324,00	209.816.568.070	-	202.810.687.778	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	448.546.236.921,00	447.488.142.484	51.046.111.000	1.716.000.000	- 61,82
1.3.1	Pendapatan Hibah	70.026.924.527,00	68.685.410.000	5.541.000.000	1.716.000.000	- 54,29
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	154.196.846.591,00	133.004.610.484	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	193.143.614.800,00	89.301.426.000	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.178.849.000,00	8.673.235.000	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	147.823.461.000	45.505.111.000	-	-

➤ **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan BPPKAD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain memuat :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan arus kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dengan demikian capaian kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi SAP (100%). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Predikat WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan telah diperiksa oleh BPK wajar menyajikan hal material, posisi keuangan dan arus kas sesuai dengan SAP.

b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	- 17,89 %	-21,14%	990,15%	-21,18%

Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus mempertimbangkan tingkat daya saing daerah yang mendukung terwujudnya iklim berusaha yang kondusif di daerah dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 416.454.707.766,00 melampaui target sebesar Rp.10.832.255.766,00 (102,67%) dari target sebesar Rp. 405.622.452.000,00.

Kenalkan PAD sebesar 102,67% diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp.167.300.451.315,00 (106,53%), Retribusi Daerah sebesar Rp.24.797.978.244,00 (84,17%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.688.535.585,00 (100%), dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 213.667.744.622 (102,51%), tetapi jika dibandingkan realisasi PAD tahun 2021 dari sebesar Rp. 507.167.074.775,00 ada penurunan sebesar Rp. 90.712.367.009,00 (17,89%). Penurunan ini disebabkan antara lain oleh tidak tercapainya Hasil Retribusi Daerah (84,17%). Hasil retribusi daerah tidak terealisasi karena adanya permohonan keringanan dari Wajib Retribusi di Pasar Kliwon. Selain itu diakibatkan turunnya penerimaan BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi. Penerimaan RSUD sempat naik pada Tahun 2020 dan 2021 akibat adanya penggantian biaya penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat yang secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan tarif di daerah. Sedangkan pada Tahun 2022, dengan semakin melandainya kasus Covid-19, dan tidak adanya biaya penggantian dari Pemerintah Pusat, pendapatan BLUD pun ikut turun.

c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,70%	96,52%	103,00%	102,11%	102,68%

Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator. Pada Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) BPPKAD tahun 2022 didasarkan pada angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja adalah menggunakan formulasi penghitungan jumlah realisasi target program (anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan aset) dibagi jumlah program dikali 100% diperoleh angka rata-rata.

d. Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,30 Nilai	77,89	96,99%	97,12%	96,87

Dari indikator nilai evaluasi SAKIP BPPKAD masih menggunakan realisasi tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 masih dalam proses oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.

Pencapaian kinerja dari kelima sasaran strategis tersebut di atas, tidak terlepas dari capaian pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	83,57 Indeks	88,39 Indeks	105,86%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	15 Dok	15 Dok	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	4 Dok	4 Dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun sesuai standar	3 Dok	3 Dok	100%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan</i>	8 Dok	8 Dok	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	74 ASN	74 ASN	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	14 orang	14 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	29 Dok	29 Dok	100%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat</i>	<i>Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	6 Orang	4 Orang	66,67%

<i>Daerah</i>	<i>formal</i>			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	6 orang	4 orang	66,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawalan yang tersusun sesuai standart	57 Dok	57 Dok	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24 Jenis	22 Jenis	91,67%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Bahan/Alat Tulis Kantor	81 Jenis	57 Jenis	70,37%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	33 Jenis	30 Jenis	90,91%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	14 Jenis	14 Jenis	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17 Jenis	14 Jenis	82,35%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya blaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	25 Kali	25 Kali	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan mebel, perlengkapan dan peralatan kantor	19 Unit	19 Unit	152,63%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29 Unit	29 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17 Orang	17 Orang	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan meterai dan pengiriman surat, paket, dokumen	5 Jenis	5 Jenis	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa untuk PHD dan Tenaga Kontrak	17 Orang	17 Orang	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	184 Unit	110 Unit	59,78%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	129 Unit	55 Unit	42,64%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 Unit	10 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	30 Unit	30 Unit	100%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang	100 persen	100 persen	100%

		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
		Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95 persen	86,17 persen	90,71%
		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	8 Dok	8 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	3 Kali	3 Kali	100%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	70 Laporan	70 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D yang sesuai standar	6954 SP2D	10.028 SP2D	144,2%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Perbup/SK/PKS terkait bidang perbendaharaan	15 Dok	18 Dok	120%
		Jumlah sosialisasi juknis dan petunjuk terbaru bidang perbendaharaan	6 Kali	6 Kali	100%

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dok	1 Dok	100%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok	3 Dok	100%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah	12 Dok	12 Dok	100%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	95 persen	99,94 persen	105,2%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	14 Dok	14 Dok	100%
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	3 Dok	2 Dok	66,67%
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Belanja dan Standar Kebutuhan BMD	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	1 Dok	1 Dok	0,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Implementasi dan Fasilitasi	34 OPD	34 OPD	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	1385 Pensertifikasi	1445 Pensertifikasi	104,33%

Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Appraisal	1 Dok	3 Dok	300%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Money Pengelolaan BMD	1 Lap	1 Lap	100%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase realisasi PAD	100 persen	102,67 persen	102,67 %
<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah Realisasi PAD</i>	<i>374 Miliar</i>	<i>416,45 Miliar</i>	<i>111,35 %</i>
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	2 Dok	2 Dok	100%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kajian pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah WP yang mengikuti sosialisasi kebijakan pajak daerah	141 WP	141 WP	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Paket	1 Paket	100%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Wajib Pajak Daerah Baru	15000 OP/WP	15346 OP/WP	102,91
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pengelolaan basis data pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	16 OP	20 OP	125%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	399000 Dok	401252 Dok	100,56 %
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	8000 Frek	12911 Frek	161,39 %
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan tahunan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengelolaan piutang pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	90 Dokumen	180%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 Dok	1 Dok	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja 3 tahun terakhir

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,70%	21,02%	124,08%	16,83 %	31,04%	184,43%	16,94%	21,02%	124,08%
2.		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100	100	100%	100	100	100 %	100 memadal	100 memadal	100%
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,01%	11,65%	387,04%	3,25%	32,18%	990,15%	3,25%	-17,89%	-21,14%
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,40%	99,89%	106,94%	93,60	95,58	102,11	93,70%	96,52%	103,00%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,1	72,88	90,98%	80,2	77,89	97,12	80,3 nilai	77,89	96,89%

Pada tabel 3.4 Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 terhadap Target BPPKAD adalah sebagai berikut :

Pada sasaran strategis meningkatkan kemandirian keuangan, kontribusi realisasi PAD terhadap Pendapatan Transfer, tahun 2022 dibandingkan realisasi PAD Tahun 2021, Kontribusi PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 416.454.707.766 atau (21,02%) menurun dibandingkan realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp. 507.243.117.542 atau (31,04%) terhadap total pendapatan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kemandirian keuangan daerah :

- Proporsi Pendapatan Transfer masih paling besar (78,89%) dalam struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Kontribusi PAD dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil (21,02%).
- Dalam menetapkan target pendapatan, belum disertai dengan kajian/analisa potensi pendapatan, hanya berdasarkan tren kenaikan pendapatan per tahun.
- Belum optimalnya pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Strategi yang akan datang :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggali sumber-sumber PAD potensial melalui penerimaan yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun kajian/analisa potensi pendapatan secara bertahap baik potensi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah bekerjasama dengan pihak ketiga.
- Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah BUMD dan BLUD dengan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari Opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari : Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah disusun BPPKAD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain memuat :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah guna memenuhi ketentuan tersebut di atas. LKPD Kabupaten Kudus pada tahun 2021 memperoleh Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualan (WTP). Perolehan Opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat diyakini kewajarannya, relevan dapat dipahami dan berkualitas oleh BPK, sedangkan LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 masih dalam proses.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tahun 2022 dari target sebesar Rp.405.622.452.000 terealisasi sebesar Rp.418.701.0798.589 (103,22%).Capaian realisasi tersebut disumbang oleh pajak daerah sebesar (106,77%), hasil pengelolaan kekayaan daerah (100%) dan lain-lain PAD yang Sah (103,50%), sedangkan retribusi daerah hanya terealisasi sebesar (83,55%).

Permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan PAD antara lain :

- Pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian, khususnya dari sisi penerimaan pajak daerah, meskipun tahun ini pandemi covid 19 sudah melandai dan sudah menunjukkan perbaikan ekonomi.
- Keterbatasan kompetensi SDM pengelola pendapatan daerah..
- Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak daerah

Strategi yang akan digunakan untuk peningkatan PAD :

- Memperkuat dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, diantaranya penyesuaian NJOP PBB P2, serta melakukan inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng, di tiap-tiap kecamatan, melakukan pemasangan tapping box yang ditempatkan di cash register di Hotel/ Restoran yang relatif besar.
- Meminimalkan kebocoran-kebocoran pendapatan pajak daerah/ retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode non tunai dalam transaksi pendapatan daerah dan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Peningkatan kapasitas kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis seperti Bintek/ Diklat tentang perpajakan, bintek pengelolaan keuangan daerah.
- Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait/ pembentukan Tim dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan salah satunya dengan Badan Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan serta menerapkan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (tapping box) dalam pengawasan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian kinerja pada sasaran strategis 3, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah mengalami peningkatan. Tahun 2022, dari target sebesar 93,70% naik sebesar 96,52%. Dibandingkan tahun 2021 sebesar 93,40%. Hal tersebut karena didukung regulasi yang ada, komitmen dari pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan anggaran dengan transparan dan akuntabel serta aplikasi informasi sistem keuangan yang handal, meskipun saat ini masih menggunakan aplikasi SIMDA BPKP dan SIPD Kemendagri.

Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD

Dari indikator nilai evaluasi SAKIP BPPKAD Tahun 2022 belum terealisasi dikarenakan masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. Untuk nilai SAKIP Tahun 2021, diperoleh hasil 77,80 meningkat dibandingkan nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 72,88.

1. Perbandingan realisasi indikator serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2022.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja tahun 2022 dengan target renstra BPPKAD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	% Capaian kinerja	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,94%	21,02%	124,08%	Sangat tinggi
		Kualitas LKPD	100 memadai	Proses	Proses	Proses
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	-17,89%	-21,14%	Sangat rendah
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,70%	96,52%	103,00%	Sangat tinggi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,30 nilai	Proses	Proses	Proses

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target Renstra 2022 yang ditetapkan BPPKAD dalam mencapai indikator kinerja tahun 2022 dengan kategori sangat tinggi karena beberapa hal diantaranya adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf BPPKAD untuk berkinerja terbaik, serta didukung pendanaan, sistem/aplikasi berbasis teknologi dan dukungan dari semua stakeholder.

Namun disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan antara lain kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan/pajak.

Menindaklanjuti keterkaitan realisasi capaian kinerja nasional, BPPKAD melaksanakan kebijakan dari Kementerian Keuangan yaitu kebijakan fiskal yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan negara, penerimaan pajak, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksana anggaran serta kualitas pengelola kekayaan negara. Kebijakan tersebut, ada di program dan kegiatan BPPKAD.

Selanjutnya keterkaitan dengan realisasi capaian kinerja BKAD Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan IKU :

1. Persentase laporan keuangan daerah berbasis akrual dengan target 100%
2. Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik dengan target 100%.

Untuk pendapatan daerah diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersendiri, tidak termasuk tugas pokok dan fungsi BKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai perbandingan kinerja yang setara dengan kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus adalah BPKAD Kabupaten Pati, dilihat dari IKU dan PAD

No	IKU BPPKAD Kab. Kudus	IKU BPKAD Kab. Pati
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2	Meningkatnya PAD	Meningkatnya PAD
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	

Sebagai perbandingan kinerja indikator meningkatnya PAD, BPPKAD Kabupaten Kudus dan BPPKAD Kabupaten Pati sebagai berikut:

PAD Kabupaten Kudus		PAD Kabupaten Pati	
2017	366.031.203.000	2017	428.374.751.000
2018	337.364.609.000	2018	384.041.850.000
2019	343.824.122.000	2019	363.824.130.000
2020	383.884.186.000	2020	371.741.589.000
2021	507.428.207.000	2021	388.644.537.000
2022	418.701.070.000	2022	362.814.604.000

2. Keberhasilan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022

Tabel 3.6

Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	16,83%	31,04%	140,95%
		Kualitas LKPD	100%	Proses	
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD	3,25%	-17,89%	-21,14%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	93,60%	95,58%	106,94%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2	Proses	

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian kinerja BPPKAD masuk kategori sangat tinggi antara lain disebabkan karena:

1. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dan seluruh staf untuk berkinerja terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Dukungan dari semua stakeholder (Pemda, masyarakat/wajib pajak/instansi vertikal/BUMD dan SKPD)
3. Penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan dan belanja daerah.

Namun disisi lain masih ada permasalahan-permasalahan diantaranya :

1. Kurangnya kompetensi SDM di bidang keuangan dan perpajakan
2. Kurang akurasi data perencanaan dan penganggaran
3. Barang Milik Daerah (BMD) belum tercatat dalam Daftar Inventaris aset Pemda.

Terhadap permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan adalah :

1. Mengusulkan pemenuhan formasi ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan kepada BKPP dan meningkatkan kapasitas SDM dengan mengirim Diklat/Bintek.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui pengelolaan data yang baik dan terintegrasi.
3. Melakukan Inventarisasi BMD secara periodik dan sertifikasi tanah Pemkab.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Ketersediaan SDM

Jumlah total pegawai BPPKAD per 31 Januari 2022 sebanyak 88 orang terdiri dari 73 orang PNS, 1 orang PHD dan 15 orang tenaga kontrak.

Tabel 2.1

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1.	44	45

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus lebih banyak pegawai perempuan dibandingkan pegawai laki-laki walaupun selisih hanya 1 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	8
2.	Sarjana	51
3.	D3	7
4.	SMU	21
5.	SMP	-
6.	SD	1
		89

Berdasarkan Tabel diatas. diketahui Latar belakang pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 30 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 10 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 53 Orang dan Paskasarjana (S2) sebanyak 8 Orang. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana (S1) sebesar 51 Orang.

Tabel 2.3

Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Pangkat

GOLONGAN																Jumlah
IV				III				II				I				
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	A	B	c	d	
9	1	1	-	4	15	5	27	0	1	1	8	-	-	-	1	73

Berdasarkan Tabel 2.3, dapat dilihat secara komposisi per golongan sebagian besar pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan golongan III yaitu sebanyak 51 orang, kedua adalah golongan II sebanyak 10 orang, ketiga adalah golongan IV

sebanyak 11 orang dan golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidikan.

No.	Jenjang	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	8
2.	Sarjana	52
3.	D4	0
4.	D3	7
5.	SMA (SLTA)	21
6.	SMP (SLTP)	0
7.	SD	1
	Jumlah	89

Dari Tabel 2.4 diketahui bahwa dengan kualitas pendidikan pasca sarjana dan sarjana berjumlah 60 orang dari keseluruhan pegawai di BPPKAD sejumlah 89 orang menunjukkan kekuatan suatu lembaga jika dikelola dengan baik. Secara keseluruhan komposisi pendidikannya sudah mencukupi, tetapi untuk sarjana komputer/Informasi Teknologi (IT) masih kurang, terlebih dengan pengalihan pelayanan pajak-pajak daerah di serahkan ke BPPKAD, maka dibutuhkan sekali tenaga IT untuk mengoperasikan program dan juga tenaga Sarjana Perpajakan/ penilai pajak.

Tabel 2.5

No	Eselon				Jumlah
	IV/a	III/b	III/a	II/b	
1.	Kasubbid/ Kasubbag/Sub kor	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Badan	23

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana.

Dalam mendukung Kinerja Organisasi selain SDM yang profesional juga diperlukan sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang nyaman tersebut mampu mendorong pegawai untuk menghasilkan kerja yang optimal.

Sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di BPPKAD dirasa masih kurang terlebih dengan adanya pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan cepat dan tepat memerlukan sarpras yang memadai seperti sistem aplikasi pajak daerah (IT) serta perangkat IT lainnya dan ditunjang dengan kemampuan dan ketrampilan personilnya.

Berikut Daftar Inventarisasi Barang dan Perlengkapan pada BPPKAD Kabupaten kudus.

(1) Ruangan :

- ruangan kepala : 1 unit
- ruangan sekretariat : 1 unit
- ruangan bidang : 5 unit

- ruangan UPT : 1 unit
- ruang pertemuan : 3 unit

(2) Kendaraan dinas :

- mobil : 7 unit
- motor : 48 unit

(3) Alat pendukung lainnya :

- Komputer PC	: 53	Unit
- Note book	: 28	Unit
- Server SIMDA	: 1	Unit
- Server PBB	: 2	Unit
- Printer	: 13	Unit
- LCD proyektor	: 3	Unit
- Kamera digital	: 3	Unit
- Handycam	: 1	Unit
- Mesin ketik standart	: 3	Unit
- Mesin ketik elektronik	: 3	Unit
- Mesin hitung manual	: 1	Unit
- Mesin kas register	: 25	Unit
- Mesin kalkuiator	: 50	Unit
- Mesin foto copy	: 1	Unit
- Almari besi	: 10	Unit
- Rak besi	: 41	Unit
- Rak kayu	: 11	Unit
- Filling cabinet	: 55	Unit
- Brankas	: 4	Unit
- Almari sorok	: 2	Unit
- Almari kaca	: 1	Unit
- Almari kayu	: 3	Unit
- Alat pengehancur kertas	: 2	Unit
- Papan pengumuman	: 1	Unit
- White board	: 3	Unit
- Mesin porforasi	: 9	Unit
- Meja tik	: 1	Unit
- Meja Panjang	: 11	Unit
- Kursi rapat	: 24	Unit
- Kursi tamu	: 2	Unit
- Kursi putar	: 8	Unit
- Bangku tunggu	: 8	Unit
- Kursi lipat	: 28	Unit
- Meja computer	: 27	Unit
- Meja kerja	: 66	Unit
- Jam dinding	: 4	Unit
- AC	: 15	Unit
- Kipas angin	: 1	Unit
- TV	: 4	Unit
- Amplivier	: 1	Unit
- Karaoke	: 2	Unit
- Wireless	: 1	Unit
- UPS	: 12	Unit
- Kamera	: 1	Unit
- Handycam	: 1	Unit
- Alat pemadam kebakaran	: 9	Unit
- Monitor	: 6	Unit
- Printer	: 36	Unit
- Scanner	: 1	Unit
- Peralatan personal computer	: 3	Unit

- Kursi rapat : 43 Unit
- Kursi kerja Eselon II : 1 Unit
- Kursi kerja Eselon III : 2 Unit
- Kursi kerja Eselon IV : 2 Unit
- Meja kerja Eselon IV : 4 Unit

Secara total sarana dan prasarana BPPKAD adalah :

No	Nama Barang	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	6.850.955.489,57
2	Bahan Perpustakaan	9.872.500,00
3	Aset Tak berwujud	311.030.000,00

3. Ketersediaan Anggaran

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2019	22.449.453.000	APBD
2	2020	20.529.498.000	APBD
3	2021	306.116.064.547	APBD
4	2022	315.451.115.000	APBD

Berdasarkan tabel diatas, mulai tahun 2021, BPPKAD melaksanakan Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak serta Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota. Tahun Anggaran 2022 BPPKAD melaksanakan 4 Program dan 13 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.315.451.114.941 terealisasi anggaran sebesar Rp.301.076.627.324

Capaian efisiensi anggaran diperoleh dari sumber daya aparatur BPPKAD sebagai berikut :

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat penambahan anggaran yang cukup besar karena BPPKAD melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, pengelolaan penyaluran Bantuan Keuangan, Dana darurat dan Bagi Hasil Kabupaten. Berdasarkan sumber daya di atas berikut tabel efisiensi penggunaan sumberdaya pada BPPKAD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan tabel 3.7 efisiensi anggaran dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2022 capaian kinerja sasaran sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 95,45%. Dengan demikian maka kategori pelaksanaan anggaran adalah efisien sebesar 4,55%. Dimana capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas realisasi anggaran.

Untuk mencapai target indikator SAKIP yang tinggi, BPPKAD perlu melakukan :

- I. Penguatan akuntabilitas melalui keterlibatan langsung setiap pimpinan unit kerja dalam penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan peningkatan capaian kinerja.
- II. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat hasil evaluasi SAKIP BPPKAD Tahun 2021 yaitu :
 - a. Perencanaan Kinerja Tahunan : Mengkomunikasikan kepada pejabat yang berkompeten terkait prosedur penyusunan target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengalokasian anggaran.
 - b. Melaksanakan monitoring pencapaian target periodik memenuhi seluruh kriteria capaian target dalam rencana aksi secara periodik/3 bulan dipantau kemajuannya, setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan alternatif solusinya, terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru, dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.
 - c. Memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta menjamin adanya keterhubungan yang logis antara setiap output kegiatan dan sasaran (outcome) yang akan dicapai.
 - d. Kualitas Pengukuran : Melaksanakan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran).
 - e. Implementasi Pengukuran : Melaksanakan revisi atas IKU dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (Inovatif) yaitu dokumen hasil revidi IKU dan usulan Kepala OPD tentang Penetapan IKU (revisi)
 - f. Memanfaatkan hasil pengukuran Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan : progress kinerja, untuk dijadikan dasar mengambil tindakan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar menyesuaikan strategi mencapai tujuan dan sasaran.
 - g. Penyajian Informasi Kinerja : Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja, bukan hanya proses realisasi kegiatan.
 - h. Penyajian 90% realisasi kinerja dapat diandalkan
 - i. Pemanfaatan Informasi Kinerja : Hasil evaluasi akuntabilitas agar digunakan secara menyeluruh dan bersifat ekstensif dalam perbaikan perencanaan baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja.
 - j. Pemenuhan Evaluasi : Menyampaikan hasil evaluasi rencana aksi dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- k. **Kualitas Evaluasi Internal** : Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas seluruh aksi dan penyajian perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan rencana aksi.
- l. **Pemanfaatan Evaluasi Internal** : Menindaklanjuti 90% rekomendasi perbaikan pelaksanaan program dan rekomendasi langkah-langkah konkrit.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,94%	21,02%	124,08%	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi Pendapatan Transfer masih paling besar (78,89%) dalam struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Kontribusi PAD dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil (21,02%). - Dalam menetapkan target pendapatan, belum disertai dengan kajian/analisa potensi pendapatan, hanya berdasarkan tren kenaikan pendapatan per tahun. - Belum optimalnya pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggali sumber-sumber PAD potensial melalui penerimaan yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. - Menyusun kajian/analisa potensi pendapatan secara bertahap baik potensi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah bekerjasama dengan pihak ketiga. - Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah BUMD dan BLUD dengan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah
		Kualitas LKPD	100 memadal	100 Memadal	100%	LKPD mendasarkan pada Satndar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Rekonsiliasi, sinkronisasi, fasilitasi lporan keuangan SKPD
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	-17,89%	-21,14%	<ul style="list-style-type: none"> - Pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian, khususnya dari sisi penerimaan pajak daerah, meskipun tahun ini sudah menunjukkan perbaikan ekonomi. - Keterbatasan kompetensi SDM pengelola pendapatan daerah dan keuangan daerah. - Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, diantaranya penyesuaian NJOP PBB P2, serta melakukan inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng, di tiap-tiap kecamatan, melakukan pemasangan tapping

							<p>box yang ditempatkan di cash register di Hotel/ Restoran yang relatif besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminimalkan kebocoran-kebocoran pendapatan pajak daerah/ retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi infomasi, penerapan metode non tunai dalam transaksi pendapatan daerah dan monitoring dan evaluasi secara berkala. - Peningkatan kapasitas kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis seperti Bintek/ Diklat tentang perpajakan, bintek pengelolaan keuangan daerah. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/ pembentukan Tim dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan salah satunya dengan Badan Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan serta menerapkan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (tapping box) dalam pengawasan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,70%	96,52%	103,00%	- Ada regulasi/Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan	- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,30 nilai	77,89	96,89%	- Komitmen pimpinan dari pengelola kegiatan dalam penyelesaian pelaksanaan program kegiatan	Melakukan koordinasi rekonsiliasi, verifikasi dengan pengelola kegiatan secara rutin

Tabel 3.7
AKUNTABILITAS
KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
KABUPATEN KUDUS

(*dalam ribu rupiah)

Sasaran Strategis	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Efisiensi	Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.436.285		17.679.452		86,02	17,98	Sekretaris	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	83,5 Indeks		89,56		107,26				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.564		11.556		56,22	43,78	Kasubbag. PEP	
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dok		15		100				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.554		3.870		40,5	59,5		
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	4 Dok		4		100				

		Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar									
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	3 Dok		3		100				
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.001		7.686		69,87	30,13		
		Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun sesuai standar	8 Dok		8		100				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.900.467		18.264.259		86,05	13,95	Kasubbag Keuangan	
		Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	8 Dok		8		100				
X.XX.D1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.790.268		16.159.659		86	14		
		Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	74 ASN		74		100				
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			103.438		100.451		97,11	2,89		
		Jumlah pengelola keglataran/keuangan PD	14 Orang		14		100				
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.762		4.149		61,36	38,64		
		Jumlah dokumen administrasi keuangan	29 Dok		29		100				
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000		8.780		58,53	41,47	Kasubbag Umpeg	
		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang		4		66,67				
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15.000		8.780		58,53	41,47		
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	6 Orang		4		66,67				

X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			314.492		238.763		75,82	24,08	Kasubbag. Umpeg
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	57 Dok			57		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.960		1.756		59,31	40,69	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24 Jenis			22		91,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.438		25.370		45,76	54,24	
		Belanja Bahan/Alat Tulis Kantor	81 Jenis			57		70,37		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.375		5.199		55,45	44,55	
		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	33 Jenis			30		90,91		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.099		30.708		69,63	30,37	
		Jumlah bahan logistik kantor	14 Jenis			14		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24.280		13.451		55,4	44,6	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17 Jenis			14		82,35		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.408		4.190		65,39	34,61	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis			2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			171.932		158.090		91,95	8,05	
		Tersedianya biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	25 Kali			25		100		

X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			266.391		257.468		96,65	3,35	Kasubbag. Umpeg
		Jumlah pengadaan mebel, perlengkapan dan peralatan kantor	19 Unit		29	152,63				
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			266.391		257.468		96,65	3,35	
		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29 Unit		29	100				
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			607.590		577.524		95,05	4,95	Kasubbag. Umpeg
		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17 Orang		17	100				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.590		7.285		68,79	31,21	
		Jumlah penyediaan meterai dan pengiriman surat, paket, dokumen	5 Jenis		5	100				
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			35.750		23.554		65,89	34,11	
		Jumlah jasa komunikasi	12 Bulan		12	100				
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			561.250		546.684		97,4	2,6	
		Jumlah penyediaan jasa untuk PPD dan tenaga Kontrak	17 Orang		17	100				
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			311.790		221.104		70,91	29,09	Kasubbag. Umpeg
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	184 Unit		110	59,78				

X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			227.079		190.162		83,74	16,26		
		Jumlah pembayaran palak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	129 Unit		55		42,64				
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			3.504		2.200		62,79	37,21		
		Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Unit		15		100				
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.601		9.827		50,14	49,86		
		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 Unit		10		100				
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			61.606		18.915		30,7	69,3		
		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	30 Unit		30		100				
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			289.212.263		278.011.716		98,13	3,87		
		Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen		100		100				Kabid Anggaran
		Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95 persen		86,17		90,71				Kabid, Perbendaharaan

		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen		100		100			Kabid. Akuntansi	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.073.173		820.823	76,49	23,51		Kabid Anggaran	
		Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	8 Dok		8		100				
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			311.289		260.488	83,68	16,32			
		Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dok		2		100				
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			185.667		143.739	77,42	22,58			
		Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok		0		0				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			348.734		274.343	78,67	21,33			
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	2 Dok		2		100				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			227.483		142.253	62,53	37,47			
		Jumlah dokumen Perubahan Perdataan Perbup APBD	2 Dok		2		100				

5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			223.585		186.426		83,38	16,62	Kabid. Perbendaharaan	
		Jumlah dokumen laporan realisasi belanja Perangkat Daerah	12 Dok		12		100				
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			115.900		99.141		85,54	14,46		
		Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	3 Kali		3		100				
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			44.000		30.411		69,12	30,88		
		Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	70 Laporan		70		100				
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetakan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			22.000		19.215		87,34	12,66		
		Jumlah SP2D yang sesuai standar	6954 SP2D		10028		144,2				
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			41.685		37.660		90,34	9,66		
		Jumlah dokumen Perbup/SK/PKS terkait bidang perbendaharaan	15 Dok		18		120				
		Jumlah sosialisasi juknis dan petunjuk	6 Kali		6		100				

		terbaru bidang perbendaharaan									
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			560.427		480.802	85,79	14,21		Kabld. Akuntansi	
		Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok		1	100					
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			62.670		57.194	91,26	8,74			
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dok		1	100					
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			221.000		199.567	90,3	9,7			
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok		1	100					
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			264.325		213.605	80,81	19,19			
		Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		3	100					

5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			5.766		5.376		93,24	6,76		
		Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok		1		100				
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			6.666		5.061		75,92	24,08		
		Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok		1		100				
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			287.355.078		278.523.864		96,23	3,77	Kabid. Perbendaharaan	
		Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah	12 Dok		12		100				
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			250.039.918		249.939.530		99,96	0,04		
		Bantuan Keuangan	1 Tahun		1		100				
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			18.665.058		7.934.032		42,51	57,49		
		Dana Darurat	1 Tahun		1		100				
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			18.650.102		18.650.102		100			
		Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 Tahun		1		100				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN			3.515.056		3.341.051		95,05	4,95	Kabid. Pengelolaan	

	BARANG MILIK DAERAH									Aset	
		Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	95 persen		98,94		105,2				
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.515.055		3.341.051		95,05	4,95	Kabid. Pengelolaan Aset	
		Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	14 Dok		14		100				
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			404.855		372.432		91,99	8,01		
		Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	3 Dok		2		66,67				
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			20.084		8.921		44,42	55,58		
		Jumlah Dokumen Standar Belanja dan Standar Kebutuhan BMD	1 Dok		1		100				
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			7.070		306		4,33	95,67		
		Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	1 Dok		0		0				
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			97.483		85.047		87,24	12,76		
		Implementasi dan Fasilitas	34 OPD		34		100				
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			2.202.716		2.130.905		96,74	3,26		

		Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	1385 Pensertifikasi		1445		104,33			
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah			79.442		66.549	83,77	16,23		
		Jumlah dokumen Appraisal	1 Dok		3		300			
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			22.698		16.664	73,41	26,59		
		Jumlah Laporan Monev Pengelolaan BMD	1 Lap		1		100			
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			680.707		660.229	96,99	3,01		
		Mengoptimalkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dok		1		100			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2.287.513		2.144.408	93,74	6,26	Kabid. Pendapatan	
		persentase realisasi PAD	100 persen		96,1		96,1			
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			2.287.513		2.144.408	93,74	6,26	Kabid. Pendapatan	
		Jumlah Realisasi PAD	374 Miliar		389		104,01			
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			3.227		2.900	89,87	10,13		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	2 Dok		2		100			

5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			131.709		99.194		75,31	24,69		
		Jumlah dokumen kajian pajak daerah	1 Dok		1		100				
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Perluasan Kebijakan Pajak Daerah			602.674		592.028		98,23	1,77		
		Jumlah WP yang mengikuti sosialisasi kebijakan pajak daerah	141 WP		141		100				
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			213.278		212.598		99,68	0,32		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Paket		1		100				
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			24.460		24.081		98,45	1,55		
		Jumlah Data Wajib Pajak Daerah Baru	15000 OP/WP		15436		102,91				
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			105.000		102.688		97,8	2,2		
		Jumlah laporan pengelolaan basis data pajak daerah	1 Dok		1		100				
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			7.893		6.554		83,04	16,96		
		Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	16 OP		20		125				
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			150.272		134.306		89,38	10,62		
		Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	399000 Dok		401252		100,56				
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			38.447		29.369		76,39	23,61		

		Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	8000 Frek		12911		161,39				
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000		2.750		45,83	54,17		
		Jumlah Laporan tahunan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	1 Dok		1		100				
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			652.414		649.155		99,5	0,5		
		Jumlah laporan pengelolaan piutang pajak daerah	1 Dok		1		100				
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			7.196		5.420		75,32	24,68		
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokume n		90		180				
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			342.139		281.007		82,13	17,87		
		Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1 Dok		1		100				
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.805		2.358		84,07	15,93		
		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 Dok		1		100				
JUMLAH				315.451.1 15		301.086.62 9		100	95,45		
								Sangat tinggi	Sangat Tinggi		

Penggunaan sumberdaya anggaran untuk mencapai sasaran adalah sebesar Rp.301.076.627.324 dari total pagu anggaran sebesar Rp.315.451.114.941. Hal ini berarti ada efisiensi anggaran sebesar Rp.10.296.604.881 (3,4)%.Penyerapan anggaran belanja tahun 2022 sebesar 95,44% dari total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 program 13 kegiatan. Apabila dibandingkan antara indikator kinerja dan pencapaian sasaran terealisasi sebesar 425,56% dengan kategori sangat tinggi, dan ada efisiensi anggaran 3,4% menunjukkan dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran BPPKAD tahun 2022 telah tercapai.

5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, berikut tabel program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	83,57 Indeks	88,39 Indeks	105,86%	Meningkatkan kualitas layanan kepada OPD dan masyarakat/Wajib Pajak (WP)	Inovasi pelayanan yang cepat dan mudah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dok	15 Dok	100%	Komitmen kinerja dari semua unsur pelaksana	Komunikasi, koordinasi dan evaluasi yang intensif dengan Bidang-Bidang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	8 Dok	8 Dok	100%	Regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi agar tepat waktu, tertib, cepat dalam pelaksanaan administrasi keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	4 Orang	66,67%	Diklat menyesuaikan tidak sesuai kebutuhan organisasi	Seleksi pemilihan Diklat yang sesuai kebutuhan organisasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	57 Dok	57 Dok	100%	Komitmen kinerja dari semua unsur pelaksana	Koordinasi dengan Bidang-Bidang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan mebel, perlengkapan dan peralatan kantor	19 Unit	19 Unit	152,63%	Ada beberapa barang yang spesifikasinya sudah discontinue	Perubahan rincian DPA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17 Orang	17 Orang	100%	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	184 Unit	110 Unit	59,78%	Keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Membuat buku penjagaan jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	
		Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95 persen	86,17 persen	90,71%	Belanja modal penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (SIHT) pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan tidak terealisasi	Mempedomani regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan

		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	8 Dok	8 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Melakukan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat /Pemerintah Provinsi
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Sosialisasi Regulasi pengelolaan keuangan daerah kepada OPD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok	1 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
	Perunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah	12 Dok	12 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pada OPD pengelola Dana Bantuan Keuangan
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	95 persen	99,94 persen	105,2%		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	14 Dok	14 Dok	100%	Belum optimalnya penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	Rekonsiliasi Aset/BMD secara berkala dengan OPD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase realisasi PAD	100 persen	102,67 persen	102,67%		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD	374 Miliar	416,45 Miliar	111,35%	- Kenaikan tersebut diantaranya karena Optimalisasi PAD, penyesuaian nilai jual obyek pajak, pemantauan transaksi pajak melalui digitalisasi elektronik di potensi-potensi pendapatan	- Membangun dan mengembangkan sistem/aplikasi based data pendapatan dan keuangan - Menyusun kajian potensi pendapatan daerah - Memperkuat dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, diantaranya

							<p>penyesuaian NJOP PBB P2, serta melakukan Inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng, di tiap-tiap kecamatan, melakukan pemasangan tapping box yang ditempatkan di cash register di Hotel/ Restoran yang relatif besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminimalkan kebocoran-kebocoran pendapatan pajak daerah/ retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode non tunai dalam transaksi pendapatan daerah dan monitoring dan evaluasi secara berkala.
--	--	--	--	--	--	--	---

REALISASI ANGGARAN

BPPKAD melaksanakan tugas pokok dan fungsi unsur penunjang bidang keuangan, dalam mendukung Misi Ke 2 Bupati, untuk mewujudkan pemerintahan yang handal untuk peningkatan pelayanan publik didukung anggaran sebesar Rp.315.451.114.941 yang digunakan untuk melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi belanja BPPKAD tahun 2022.

Tabel. 3.12
AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN KUDUS

Sasaran Strategis	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.438.285		17.579.452		86,02	Sekretaris	
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	83,5 Indeks		89,56		107,26			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.554		11.558		56,22	Kasubbag. PEP	
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dok		15		100			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.554		3.870		40,5		
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	4 Dok		4		100			

		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	3 Dok		3		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.001		7.686	69,87		
		Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun sesuai standar	8 Dok		8		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.900.467		16.264.259	86,05		Kasubbag Keuangan
		Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	8 Dok		8		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.790.268		16.159.659	86		
		Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	74 ASN		74		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			103.438		100.451	97,11		
		Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	14 Orang		14		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.762		4.149	61,36		
		Jumlah dokumen administrasi keuangan	29 Dok		29		100		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000		8.780	58,53		Kasubbag Umpeg
		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang		4		66,67		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15.000		8.780	58,53		
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	6 Orang		4		66,67		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			314.492		238.763	75,92		Kasubbag Umpeg
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian	57 Dok		57		100		

		<i>yang tersusun sesuai standart</i>							
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.960		1.756		59,31	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24 Jenis		22		91,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.436		25.370		45,76	
		Belanja Bahan/Alat Tulis Kantor	81 Jenis		57		70,37		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.375		5.199		55,45	
		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	33 Jenis		30		90,91		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.099		30.708		69,63	
		Jumlah bahan logistik kantor	14 Jenis		14		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24.280		13.451		55,4	
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	17 Jenis		14		82,35		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.408		4.190		65,39	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			171.932		158.090		91,95	
		Tersedianya biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	25 Kali		25		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			266.391		257.468		96,65	Kasubbag. Umpeg

		<i>Jumlah pengadaan mebel, perlengkapan dan peralatan kantor</i>	19 Unit		29		152,63		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			266.391		257.468		96,65	
		<i>Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>	29 Unit		29		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			607.590		577.524		95,05	Kasubbag. Umpeg
		<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	17 Orang		17		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.590		7.285		68,79	
		<i>Jumlah penyediaan meterai dan pengimanan surat, paket, dokumen</i>	5 Jenis		5		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			35.750		23.554		65,89	
		<i>Jumlah jasa komunikasi</i>	12 Bulan		12		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			561.250		546.684		97,4	
		<i>Jumlah penyediaan jasa untuk PHD dan Tenaga Kontrak</i>	17 Orang		17		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			311.790		221.104		70,91	Kasubbag. Umpeg
		<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	184 Unit		110		59,78		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau			227.079		190.162		83,74	

	Lapangan									
		Jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	129 Unit		55		42,64			
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			3.504		2.200	62,79			
		Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Unit		15		100			

X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.601		9.827		50,14		
		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 Unit		10		100			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			61.606		18.915		30,7		
		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	30 Unit		30		100			
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			289.212.263		278.011.716		96,13		
		Persentase idasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen		100		100		Kabid Anggaran	
		Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95 persen		86,17		90,71		Kabid. Perbendaharaan	
		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen		100		100		Kabid. Akuntansi	
5.02.02.2.01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>			1.073.173		820.823		76,49	Kabid Anggaran	
		<i>Jumlah Dokumen Anggaran Daerah</i>	8 Dok		8		100			
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			311.289		260.488		83,68		
		Jumlah dokumen	2 Dok		2		100			

		KUA dan PPAS							
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			185.667		143.739		77,42	
		Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok		0		0		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			348.734		274.343		78,67	
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	2 Dok		2		100		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			227.483		142.253		62,53	
		Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2 Dok		2		100		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			223.585		186.426		83,38	Kabid. Perbendaharaan
		Jumlah dokumen laporan realisasi belanja Perangkat Daerah	12 Dok		12		100		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			115.900		99.141		85,54	
		Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	3 Kali		3		100		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			44.000		30.411		69,12	

		Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	70 Laporan		70		100		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyediaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			22.000		19.215		87,34	
		Jumlah SP2D yang sesuai standar	6954 SP2D		10028		144,2		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			41.685		37.660		90,34	
		Jumlah dokumen Perbup/SK/PKS terkait bidang perbendaharaan	15 Dok		18		120		
		Jumlah sosialisasi juknis dan petunjuk terbaru bidang perbendaharaan	6 Kali		6		100		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			560.427		480.802		85,79	Kabid. Akuntansi
		Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok		1		100		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan			62.670		57.194		91,26	

	Semesteran								
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dok		1		100		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			221.000		199.567	90,3		
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok		1		100		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pentabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			264.325		213.605	80,81		
		Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		3		100		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			5.766		5.376	93,24		
		Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok		1		100		

5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			6.666		5.061		75,92		
		Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok		1		100			
5.02.02.2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>			287.355.078		276.523.664		96,23	Kabid. Perbendaharaan	
		<i>Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah</i>	12 Dok		12		100			
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			250.039.918		249.939.530		99,96		
		Bantuan Keuangan	1 Tahun		1		100			
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			18.665.058		7.934.032		42,51		
		Dana Darurat	1 Tahun		1		100			
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			18.650.102		18.650.102		100		
		Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 Tahun		1		100			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.515.055		3.341.051		95,05	Kabid. Pengelolaan Aset	
		Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	95 persen		99,94		105,2			
5.02.03.2.01	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>			3.515.055		3.341.051		95,05	Kabid. Pengelolaan Aset	

		Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	14 Dok		14		100		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			404.855		372.432	91,99		
		Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	3 Dok		2		66,67		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			20.084		8.921	44,42		
		Jumlah Dokumen Standar Belanja dan Standar Kebutuhan BMD	1 Dok		1		100		
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			7.070		306	4,33		
		Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	1 Dok		0		0		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			97.483		85.047	87,24		
		Implementasi dan Fasilitasi	34 OPD		34		100		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			2.202.716		2.130.905	96,74		
		Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	1385 Pensiortifikasi		1445		104,33		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah			79.442		66.549	83,77		
		Jumlah dokumen Appraisal	1 Dok		3		300		
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian			22.698		16.664	73,41		

	Pengelolaan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Monev Pengelolaan BMD	1 Lap		1		100		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			680.707		660.229	96,99		
		Mengoptimalkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dok		1		100		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2.287.513		2.144.408	93,74	Kabid. Pendapatan	
		persentase realisasi PAD	100 persen		96,1		96,1		
5.02.04.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>			2.287.513		2.144.408	93,74	Kabid. Pendapatan	
		Jumlah Realisasi PAD	374 Milliar		389		104,01		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			3.227		2.900	89,87		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	2 Dok		2		100		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			131.709		99.194	75,31		
		Jumlah dokumen kajian pajak daerah	1 Dok		1		100		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			602.674		592.028	98,23		
		Jumlah WP yang mengikuti sosialisasi kebijakan pajak	141 WP		141		100		

		daerah							
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			213.278		212.598		99,68	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Paket		1		100		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			24.460		24.081		98,45	
		Jumlah Data Wajib Pajak Daerah Baru	15000 OP/WP		15436		102,91		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			105.000		102.688		97,8	
		Jumlah laporan pengelolaan basis data pajak daerah	1 Dok		1		100		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			7.893		6.554		83,04	
		Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	16 OP		20		125		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			150.272		134.306		89,38	
		Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	399000 Dok		401252		100,56		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			38.447		29.369		76,39	
		Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	8000 Frek		12911		161,39		
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000		2.750		45,83	
		Jumlah Laporan tahunan penelitian dan verifikasi data	1 Dok		1		100		

		pelaporan pajak daerah							
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			652.414		649.155		99,5	
		Jumlah laporan pengelolaan piutang pajak daerah	1 Dok		1		100		
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			7.196		5.420		75,32	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen		90		180		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			342.139		281.007		82,13	
		Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1 Dok		1		100		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.805		2.358		84,07	
		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 Dok		1		100		
JUMLAH				315.451.115					

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran adalah sebesar Rp.301.076.627.324 dari total pagu anggaran sebesar Rp.315.451.114.941. Akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan baik mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai pencapaian target output kegiatan sesuai yang ditargetkan.

Berdasarkan tabel di atas ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.296.604.881 (3,4)%. Penyerapan anggaran belanja tahun 2022 sebesar 95,44% dari total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 program 13 kegiatan. Apabila dibandingkan antara Indikator kinerja dan pencapaian sasaran terealisasi sebesar 425,56% dengan kategori sangat tinggi, dan ada efisiensi anggaran 3,4% menunjukkan dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran BPPKAD tahun 2022 telah tercapai.

BAB IV PENUTUP

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus sebagai Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sarana prasarana dan sumber dana secara efisien dan seefektif mungkin.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan suatu organisasi adalah komitmen yang kuat dari pimpinan dan didukung semua staf Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus untuk memfokuskan sumber-sumber daya (resources) organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPPKAD.

Keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2022 dilihat dari skala penilaian capaian kinerja semua target sasaran yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dengan target 16,94% dengan realisasi 21,02% dengan persentase capaian 124,08% sehingga capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
2. Meningkatnya PAD target 3,25% realisasi -17,89% persentase capaian -21,14% capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah target 93,70% realisasi 96,52% persentase capaian 103,11% capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD dengan target nilai 80,10 realisasi dalam proses evaluasi Inspektorat Kabupaten Kudus.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus selalu diupayakan untuk meningkat kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 BPPKAD Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kudus, 2023



EKO DJUMARTONO, SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681004 199303 1 006